

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BATU

M. Rozikin

Universitas Brawijaya Malang

raymountana@gmail.com

Abstract

This paper is a study of qualitative approach about sustainable development in the Batu city. The conventional development has managed to increase economic growth, but failed in the social and environmental aspects. The studies show that perception of economic development is economic growth, so that the social and environmental factors are put in a less important position. Development paradigm shift to sustainable development. Indonesia is an agricultural country that has quite large agricultural potential, so that the development of agriculture has to be an important strategy of development. One manifestation of the development of sustainable agriculture is a policy of agropolitan regional development, which is carried out in Batu city.

Keywords: sustainable development, environmental

Abstrak

Tulisan ini merupakan studi dengan pendekatan kualitatif tentang pembangunan berkelanjutan di kota Batu. Pembangunan yang menekankan pada aspek pertumbuhan, sehingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Studi menunjukkan, hal ini karena persepsi pembangunan ekonomi adalah persoalan pertumbuhan, sehingga faktor sosial dan lingkungan diletakkan pada posisi yang kurang penting. Paradigma pembangunan bergeser ke pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, sehingga pengembangan pertanian menjadi strategi pembangunan yang penting. Salah satu wujud dari pembangunan bidang pertanian yang berkelanjutan adalah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan, yang dilakukan di kota Batu.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, lingkungan

Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan sebagaimana pada umumnya, menjadi *sel projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam *ideology of developmentalism*.

Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Berdasarkan hal itu maka terjadilah pergeseran paradigma pembangunan. Melalui proses itu, timbullah pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma dependensia sampai keparadigma pembangunan manusia (Tjokrowinoto, 1996: 41).

Secara sederhana menurut Suryono (2010: 16-23), paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan suatu pandangan pembangunan yang hanya memfokuskan pada sektor ekonomi. Paradigma pembangunan ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita negarane-negara berkembang. Namun keberhasilan paradigma ini menyebabkan dampak negatif, hal ini dikarenakan momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan deteorisasi ekologis berupa penyusutan sumberdaya alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi.

Dampak negatif yang terjadi terus mengalami akumulasi sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Kehancuran yang serius pada hutan-hutan di Eropa Barat, terjadinya “*oil shock* 1983”, kelaparan di benua Afrika, me-

nurunnya kualitas lingkungan di negara-negara tropis, gejala memanasnya bola bumi yang disebabkan efek rumah kaca (*greenhouse effect*) akibat menipisnya lapisan ozon, menciutnya luas hutan tropis, dan meluasnya gurun, serta melumernya lapisan es di Kutub Utara dan Selatan Bumi dapat dijadikan sebagai indikasi dari terjadinya pencemaran lingkungan karena penggunaan energi dan berbagai bahan kimia secara tidak seimbang (Toruan, dalam Jakob Oetama, 1990: 16 - 20).

Kesadaran akan krisis lingkungan hidup kemudian melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan. Perhatian kepada kelestarian hutan-hutan tropis di negara miskin mulai menjadi agenda penting dunia. Di sinilah kemudian konsep "*sustainable*" menemukan kelahirannya (Suryono, 2010: 16).

Berdasarkan hal tersebut, maka tercetuslah konsep pembangunan yang mencoba menyeimbangkan sektor-sektor pembangunan, konsep tersebut dinamakan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut Budimanta (2005: 7-10), pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Di negara berkembang, pembangunan berkelanjutan masih pada tataran konsep yang mulai banyak dikembangkan. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, sehingga pengembangan pertanian menjadi salah satu strategi dalam pembangunan Indonesia. Dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 Kementerian Pertanian juga menjelaskan beberapa strategi kebijakan pengembangan pertanian diantaranya yaitu peningkatan produksi pertanian.

Salah satu kebijakan tentang pembangunan pertanian ialah agropolitan yang merupakan program pemerintah yang berdasarkan pada sistem pertanian tradisional yang dipadukan dengan sistem perkotaan modern. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produk pertanian yang ada di sekitarnya. Agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe *bottom up* yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding strategi *growth pole*.

Daerah yang melaksanakan kebijakan agropolitan salah satunya adalah kota Batu, Malang. Agropolitan juga telah menjadi fungsi Kota Batu yang ditetapkan pada Perda Kota Batu Nomor 3 pasal 16 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2003-2013. Kemudian pada tahun 2007 dibentuklah Pokja Agropolitan melalui keputusan Walikota Batu. Tahun 2011 agropolitan telah menjadi visi Kota Batu pada Perda Kota Batu Nomor 7 pasal 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2010-2030 yang berbunyi Visi Penataan Ruang Kota Batu adalah: “Kota Batu sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur”.

Melihat begitu penting pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bentuk pembangunan yang lebih mengakomodir keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan, serta agropolitan yang merupakan salah satu bentuk konsep pembangunan yang berbasis pada potensi sumber daya alam, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada kebijakan agropolitan di Kota Batu.

Pembangunan Berkelanjutan

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh perhatian yang besar kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, karena di sisi lain eksploitasi terhadapnya dilakukan secara terus menerus. Semua ini agar tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehingga pembangunan yang dilakukan di masa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat *Komisi Brundtland (World Commission on Environmental and Development)* dalam konferensi Stockholm (1972), mengenai pentingnya pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan. Emil Salim mengatakan bahwa saat ini, hampir semua negara mengimplementasikan pola pembangunan konvensional yang mengikuti satu garis linier paham ekonomi yang terfokus pada pertumbuhan *output* sebagai fungsi faktor produksi, yang terdiri atas sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, keterampilan dan teknologi (Aziz J. dkk., 2010: 21-29).

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan konvensional meletakkan pembangunan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi, karena menyebabkan ketimpangan yang lebih besar pada distribusi pendapatan antar negara maupun didalam negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pembangunan berkelanjutan, yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Matriks Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dari/Ke	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Ekonomi	Pengentasan Rakyat Miskin	Dampak Terkait	Dampak Terkait
Sosial	Dampak Terkait	Pembangunan Manusia	Dampak Terkait
Lingkungan	Dampak Terkait	Dampak Terkait	Pelestarian Ekosistem

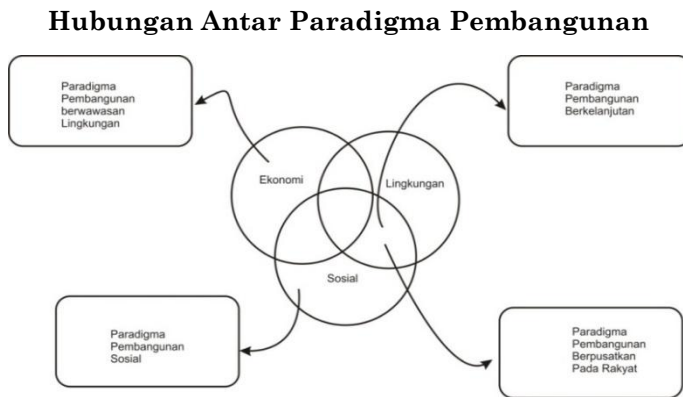
Matriks di atas menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan memiliki dampak ekonomi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang harus dipertimbangkan. Demikian pula upaya mencapai perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) akan mempengaruhi aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, bentuk keterkaitan ini dan segala dampaknya harus dipertimbangkan. Melalui penelusuran keterkaitan di antara berbagai dampak tersebut, maka akan menyatukan ketiga proses ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional yaitu *pertama*, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang; *kedua*, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan; *ketiga*, skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi, dan melalui metode alokasi sumber daya seefisien mungkin; *keempat*, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam harga pasar; *kelima*, pemerintah harus bisa mengoreksi kegagalan pasar melalui kebijakan yang tepat, hal ini memerlukan komitmen pemerintah secara penuh dalam melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Terdapat tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi (Hikmat, 2000:1). Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut

menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (*sosial development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); dan (3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*). Integrasi antara ketiga bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.



Sumber: Hikmat, 2000:15

Pembangunan berkelanjutan tampil sebagai konsep atau pendekatan baru, sebagai koreksi atas kebijakan-kebijakan atau strategi pembangunan yang dianut pasca perang dunia kedua sampai dasawarsa 1980-an, yang dinilai gagal mencapai tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat masa kini, maupun umat manusia di masa mendatang.

Konsep ini dilahirkan oleh bangkitnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi telah melampaui daya dukung lingkungan, alam, sehingga keberlanjutan upaya membangun kesejahteraan bahkan kelangsungan kehidupan umat manusia di atas bumi ini dipertanyakan (Kartasasmita, 2007: 1-2). Berdasarkan uraian di atas, maka Soemarwoto (2006: 29) menyimpulkan bahwasanya pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak

mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya.

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Haris (dalam Fauzi, 2004: 7) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman: 1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidak-seimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri; 2) keberlanjutan lingkungan yaitu sistem keberlanjutan lingkungan yang harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; 3). keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Pada era sebelum pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan bagi dilaksanakannya suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada 3 tahapan yang dilalui oleh setiap negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangannya harus telah memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi

politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat. Tahapan-tahapan ini digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.

Evolusi konsep pembangunan berkelanjutan

Sebelum adanya Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Produktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi)	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi Keadilan sosial	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi Keadilan sosial Partisipasi Politik Sosial Budaya

Sumber : Sarosa, 2004:376

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan politik. Beberapa indikator yang menjadi syarat pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.

Pemikiran Syarat Pembangunan Berkelanjutan

Dimensi	Brundtland, G.H (1987)	ICPQL (1996)	Becker, F. et.al (1997)
Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua	Keadilan sosial, kesetaraan gender, rasa aman, menghargai diversitas budaya	Penekanan pada proses pertumbuhan sosial yang dinamis, keadilan sosial dan pemerataan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Ekonomi kesejahteraan	Ekonomi kesejahteraan
Lingkungan	Lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang	Keseimbangan lingkungan yang sehat	Lingkungan adalah dimensi sentral dalam proses sosial

Sumber: Gondokusumo, 2005.

Djadiningrat (2005:32-45), menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis mengacu pada pemeliharaan tatanan lingkungan hidup di bumi agar dapat terus terjaga kelestariannya. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk

memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui: pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak, meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut di atas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

3. Keberlanjutan Sosial Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya

kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.

- c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

4. Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada *human right*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

5. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

Keberlanjutan pertahanan dan keamanan yaitu bagaimana cara menghadapi dan mengatasi ancaman dari luar maupun dalam yang dapat membahayakan identitas, integritas negara dan bangsa. Adapun prinsip dasar dari pembangunan berkelanjutan meliputi, antara lain:

Pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat. *Kedua*, menghargai keanekaragaman (*diversity*). Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan

datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara memanfaatkan dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.

Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu diubah.

Kebijakan Agropolitan

Menurut Friedman dan Douglass, agropolitan adalah aktivitas pembangunan terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis di pusat agropolitan, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agrobisnis) di wilayah sekitarnya. Perkembangan kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat Provinsi (RTRW Provinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), maka pengembangan kawasan agropolitan harus mendukung

pengembangan kawasan andalan. Dengan demikian tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan (Djakapermana, 2003: 54).

Pengembangan kawasan agropolitan memiliki tiga agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur tahun 2009-2012 yaitu: 1) meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; 2) memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi; 3) memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

Salah satu Kota yang melakukan pengembangan kawasan agropolitan yaitu kota Batu. Kota Batu telah terbentuk kawasan agropolitan mandiri sejak tahun 2001 (Bappeda Jatim, 2011). Selain itu, agropolitan juga telah menjadi fungsi Kota Batu yang ditetapkan pada Perda Kota Batu Nomor 3 pasal 16 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2003-2013. Kemudian pada tahun 2007 dibentuklah Pokja Agropolitan melalui keputusan Walikota Batu. Tahun 2011 agropolitan telah menjadi visi Kota Batu pada Perda Kota Batu Nomor 7 pasal 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2010-2030 yang berbunyi Visi Penataan Ruang Kota Batu adalah: Kota Batu sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur. Melihat berbagai dasar hukum yang telah dibuat oleh Kota Batu menunjukkan upaya Kota Batu selama ini untuk menerapkan agropolitan.

Tujuan pembangunan agropolitan adalah memasukkan beberapa unsur penting dari gaya hidup kota ke dalam daerah pedesaan yang berpenduduk dengan kepadatan tertentu. Di dalam wilayah agropolitan disediakan berbagai fungsi layanan yang meliputi sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan dan peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi). Konsep agropolitan juga memperkenalkan adanya agropolitan distrik yaitu suatu daerah

pedesaan dengan radius pelayanan 5-10 km dan dengan jumlah penduduk 50-150 ribu jiwa serta kepadatan penduduk minimal 200 jiwa/km² (Bappeda Kota Batu, 2012).

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yang saling membutuhkan dan bersifat interdependensi. Gerakan pengembangan agropolitan adalah pembangunan pada suatu kawasan yang bersifat multisektoral yang pelaksanaannya mensyaratkan koordinasi dan sinergi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan agropolitan dapat dikembangkan bila memenuhi persyaratan berikut.

1. Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dipasarkan atau telah mempunyai pasar. Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian tetapi juga kegiatan off farm-nya yaitu mulai dari pengadaan sarana sampai kegiatan pemasaran serta kegiatan penunjangnya.
2. Memiliki berbagai sarana dan prasarana agrobisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrobisnis yaitu pasar, lembaga keuangan, kelembagaan petani, balai penyuluhan pertanian, percobaan atau pengkajian teknologi agribisnis dan jaringan jalan yang memadai.
3. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi, listrik, komunikasi, air bersih dan lain-lain.
4. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain

5. Kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan melalui pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis, pengembangan kelembagaan petani, pengembangan kelembagaan sistem agribisnis, pengembangan sistem, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan aliran komoditi barang jasa modal informasi, serta memperbaiki dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan juga meningkatkan fungsi dan efektivitas kelembagaan pemerintah. Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan agropolitan meliputi indikator dampak dan indikator hasil yang disusun berdasarkan acuan pedoman umum PKA, antara lain.

1. Indikator Output (hasil)

- a. Tim penyuluh multi disiplin dan profesional terbentuk dari operasional di kawasan agropolitan.
- b. 80% dari kontak tani maju terpilih, yang dilatih mampu menjadi tempat belajar bagi petani di lingkungannya.
- c. 80% kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi, kelompok usaha) di kawasan agropolitan (yang dibina) mampu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan.
- d. Jaringan bisnis dari pelaku agribisnis di kawasan agropolitan terbentuk dan aktif. Tiap desa dan kecamatan di lokasi kawasan agropolitan menyusun rencana program tahunan secara partisipatif, padu-konsep-strategi pengembangan kawasan dan sesuai dengan alur rencana program/kegiatan di dalam rencana (detail) Tata Ruang Kawasan Agropolitan (atau rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sektor Unggulan Pertanian), dan disetujui bersama untuk dilaksanakan.
- e. Jumlah kegiatan (dan nilainya) dari berbagai program (terencana) yang dikelola SKPD elemen Pokja untuk lokasi kawasan agropolitan meningkat (berkembang) dari tahun ke tahun, sebagai bentuk komitmen pemerintah.

- f. Matrik program (Rencana Kegiatan) jangka panjang dan *Detail Engineering Design* untuk pelaksanaan fisik sarana dan prasarana di kawasan agropolitan disetujui bersama untuk dilaksanakan dan 70% dapat dilaksanakan di kawasan agropolitan.
 - g. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran, baik lokasi maupun pemanfaatannya.
 - h. Aliran komoditi (barang), jasa, modal dan informasi meningkat seiring dengan pengembangan sistem dan peningkatan sarana-prasarana.
 - i. Trend kemampuan pembiayaan pembangunan daerah Kota Batu terhadap target atau capaian pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan di kawasan agropolitan meningkat setiap tahunnya.
2. Indikator *Outcome* (Dampak)
- a. Pendapatan masyarakat dan pendapatan keluarga petani di kawasan agropolitan (di perkotaan dan pedesaan *hinterland*-nya) meningkat minimal 5%.
 - b. Produktivitas lahan di kawasan agropolitan meningkat minimal 5%.
 - c. Produk dan produktivitas tanaman komoditas andalan dan atau komoditas unggulan yang akan diandalkan meningkat.
 - d. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman komoditas andalan dan atau komoditas unggulan yang akan diandalkan meningkat.
 - e. Investasi masyarakat (pelaku agrobisnis, swasta lainnya, BUMD, dan/atau BUMN) di kawasan agropolitan meningkat minimal 10%.
 - f. Nilai anggaran pembangunan pemerintah daerah Kota Batu meningkat sebagai akibat (langsung maupun tidak) peningkatan PAD.
 - g. Kualitas lingkungan pemukiman dan permukiman (kawasan budidaya) membaik dan pemanfaatan sumberdaya lahan, sumberdaya air, dan sumber daya alam lainnya

berlangsung secara seimbang dan dapat menjamin keberlanjutannya.

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) pada Kebijakan Agropolitan

Konsep agropolitan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990 di Bappenas, tetapi belum banyak diimplementasikan di daerah-daerah kawasan Indonesia. Namun demikian, apabila dilihat dari tujuan dan sasarannya sudah banyak program lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam agropolitan seperti adanya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) pada awal Orde Baru dapat dipandang sebagai peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Agropolitan merupakan kelanjutan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan kawasan andalan di daerah KSP, KAPET, dan kawasan tertinggal.

Pengembangan agropolitan di Indonesia dari awal didesain sebagai suatu gerakan bukan program prioritas atau kebijakan. Program pembangunan agropolitan yang terencana dimulai pada tahun 2002 melibatkan berbagai sektor di delapan provinsi yaitu Sumatra Barat, Bengkulu, Jawa Barat, DI Jogjakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. Menurut Direktorat Pengembangan Pemukiman sampai tahun 2010 jumlah kawasan agropolitan yang sudah disepakati sebanyak 312 kawasan. Perkembangan kawasan agro di Jawa Timur tahun 2012 telah diikuti oleh 23 kabupaten dan 1 kota (Batu, sebagai kawasan mandiri).

Pelaksanaan agropolitan di Kota Batu telah berkembang mulai tahun 2001, Kota Batu sejak berubah status dari Kota Administratif menjadi Kota Madya telah dikatakan oleh Bappenas bahwa Kota Batu menjadi kawasan agropolitan mandiri. Bekal tersebut kemudian dikembangkan dalam RT dan RW Kota Batu tahun 2003-2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Batu Nomor 3 tahun 2004. Selanjutnya tahun 2007 dibentuklah Pokja pengembangan kawasan agropolitan sebagai upaya dalam meningkatkan

kegiatan program pengembangan kawasan agropolitan dan mensinergikan berbagai potensi.

Menurut penjelasan Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian BAPPEDA Kota Batu menjelaskan bahwa kebijakan publik sangat tergantung oleh komitmen dari kepala daerah, oleh karena itu meskipun sejak 2007 telah dibentuk POKJA, namun belum dapat melaksanakan kebijakan agropolitan dengan maksimal karena pada tahun 2007 terjadi peralihan kepala daerah di Kota Batu. Kepala daerah terpilih tidak menjadikan agropolitan sebagai visi, melainkan pariwisata sebagai visi Kota Batu. Selama tahun 2007 sampai tahun 2011 kebijakan agropolitan di Kota Batu berjalan ditempat karena kurang mendapatkan prioritas. Dinas pertanian Kota Batu juga menjelaskan bahwa selama menjalankan kebijakan, kegiatan untuk menunjang agropolitan harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan rutin tahunan dari dinas pertanian, belum terdapat prioritas kegiatan guna mendukung agropolitan secara langsung.

Menilai pelaksanaan agropolitan dan kinerja dari Pokja PKA (Pengembangan Kawasan Agropolitan) yang belum optimal, serta Agropolitan yang menjadi Visi RT dan RW Kota Batu tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Perda No. 01/2011, maka pada tahun 2012 ini dibentuklah Pokja PKA baru agar kedepan sistem kelembagaan agropolitan Kota Batu dapat berjalan sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan.

Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis dan masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat tanpa harus mengorbankan kehidupan manusia pada generasi mendatang dengan memperhatikan segala aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dalam melakukan

pembangunan berkelanjutan terdapat fase. Di beberapa negara, fase-fase yang dilalui untuk melakukan pembangunan berkelanjutan antara lain terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.

Tabel Fase Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum adanya Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Produktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi)	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi Keadilan sosial	Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan ekologi Keadilan social Partisipasi Politik Sosial Budaya

Sumber: Sarosa, 2005:376.

Tahapan-tahapan di atas dapat dijadikan acuan untuk menganalisis pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu. Jika melihat dari *master plan* pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu dijelaskan bahwa pada pengembangan awal dilakukan pembuatan sistem keterpaduan agrobisnis, kemudian penataan struktur ruang, sistem kegitan, pengembangan SDM, manajemen dan pengusaha kawasan, dan Sistem prasarana Kawasan agropolitan.

Jika dipahami secara garis besar, tahapan pelaksanaan agropolitan belum menunjukkan fase-fase secara bertahap dalam mencapai keseimbangan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika arah dari pembangunan agropolitan menjadi pembangunan berkelanjutan, seharusnya pada fase pertama lebih ditekankan pada pengembangan pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan.

Begitu pula pada fase kedua, *master plan* agropolitan yang menjelaskan kembali proses-proses pengembangan sistem produksi dan pemasaran produk-produk hasil pertanian lebih menitik beratkan pada aspek produksi atau pertumbuhan ekonomi padahal setelah pengembangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan seharusnya perlu dilakukan pengembangan keadilan sosial, sehingga terdapat perkembangan secara simultan dari setiap fase yang telah dilakukan. Begitu

pula pada fase ketiga, setelah pengembangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, maka perlu juga dikembangkan partisipasi politik dan sosial budaya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam aspek pembangunan berkelanjutan, Djajadiningrat (2005) menjelaskan bahwa indikator dalam pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya; *pertama*, keberlanjutan Ekologis. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui; pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak, dan meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Dalam perjalanan pelaksanaan agropolitan dari tahun 2001 hingga 2011 belum nampak hasil yang jelas, dikarenakan komitmen politik yang masih lemah, sehingga seluruh SKPD di Kota Batu hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan agenda kegiatan yang telah ada pada Program Kerja. Seperti halnya kantor lingkungan hidup, menjelaskan bahwa terdapat beberapa program kerja seperti pengawasan kualitas air, pengembangan pupuk organik, pengawasan kualitas tanah, peningkatan kualitas dan kuantitas mata air melalui penghijauan dan sumur resapan. Jika mengacu pada ukuran atau indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek keberlanjutan ekologis, peran dari lingkungan hidup sudah dapat disimpulkan telah memenuhi syarat dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Namun jika dilihat dari pelaksanaan agropolitan sesuai dengan pedoman dan rencana, sebenarnya masih belum memenuhi syarat dari aspek keberlanjutan ekologis.

Indikator *kedua*, keberlanjutan ekonomi. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang *tangible*. Kemudian secara prinsip harga sumber daya alam

harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan, dan biaya pemanfaatannya. Dalam kebijakan agropolitan, penetapan harga produk hasil pertanian dilakukan secara langsung oleh petani dan pembeli, proses penetapan harga juga belum dapat menilai biaya-biaya lingkungan. Meskipun kebijakan agropolitan merupakan kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program seperti penataan kawasan, pembuatan fasilitas, penentuan komoditi unggulan, namun program-program tersebut tidak sesuai dengan indikator-indikator dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga keberlanjutan ekonomi dalam konsep pembangunan agropolitan masih belum dapat terjamin secara optimal. Jika penetapan harga dalam memanfaatkan sumber daya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya, dapat dipahami bahwa kapasitas petani dalam menetapkan harga sangatlah terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi secara intensif dalam penetapan harga produk hasil pertanian atau adanya kelembagaan yang menentukan harga dengan berdasarkan biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Standar penetapan harga dengan mekanisme diatas membawa kontribusi sebagai pencegah manusia dalam mengeksploitasi SDA secara berlebihan, sehingga keseimbangan pembangunan dapat terjaga sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indikator *ketiga*, Keberlanjutan Sosial Budaya. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran diantaranya adalah, stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. Melihat perjalanan dari kebijakan agropolitan yang sudah berjalan hampir 10 tahun ternyata belum melahirkan komitmen politik yang kuat. Agropolitan seolah menjadi kepentingan kepala daerah, bukan menjadi sebuah kebijakan yang masyarakat butuhkan sehingga harus mendapatkan

prioritas dan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah. Di Kota Batu potensi SDA yang tinggi membuat masyarakat secara alamiah memanfaatkan SDA yang ada di desa yang dijadikan tempat tinggal, oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan agropolitan kesadaran dan partisipasi masyarakat sangatlah tinggi. Sasaran yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Jika melihat dari target-target yang telah ditetapkan dalam *masterplan* dan *action plan* agropolitan nampak jelas bahwa tujuan utama agropolitan untuk mengurangi dan memerangi kemiskinan. Namun demikian, kebijakan agropolitan belum berjalan secara optimal, sehingga angka kemiskinan dari tahun ketahun belum dapat dikaitkan dengan keberhasilan kebijakan agropolitan. Sasaran ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Adanya mekanisme musyawarah dalam *masterplan* dan *action plan* pada agropolitan menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya dalam melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan, sehingga dalam agropolitan telah berusaha untuk mencapai keberlanjutan sosial budaya yang terdapat pada pembangunan berkelanjutan. Jika dilihat secara garis besar *out put* yang ada pada keseimbangan sosial budaya dari pelaksanaan agropolitan masih sangat minim, dikarenakan banyak hal-hal yang masih belum terakomodir dan terjamin secara baik dalam kebijakan agropolitan ukuran-ukuran adanya keberlanjutan sosial budaya.

Penutup

Pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu pada awalnya dilakukan dengan pembuatan sistem keterpaduan agrobisnis, kemudian penataan struktur ruang, sistem kegiatan, pengembangan SDM, manajemen dan pengusaha kawasan, dan sistem prasarana kawasan agropolitan. Jika dipahami secara garis besar, tahapan pelaksanaan agropolitan belum menunjukkan fase-fase secara bertahap dalam mencapai keseimbangan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan kawasan agropolitan di Kota Batu dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, *pertama*, keberlanjutan ekologis. Dimana hal itu dilaksanakan melalui; pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak, dan meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Namun dalam perjalanan pelaksanaan agropolitan dari tahun 2001 hingga 2011 belum nampak hasil yang jelas, dikarenakan komitmen politik yang masih lemah, sehingga seluruh SKPD di Kota Batu hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan agenda kegiatan yang telah ada pada Program Kerja.

Kedua, keberlanjutan ekonomi, dimana dalam kebijakan agropolitan, penetapan harga produk hasil pertanian dilakukan secara langsung oleh petani dan pembeli, proses penetapan harga juga belum dapat menilai biaya-biaya lingkungan. Meskipun kebijakan agropolitan merupakan kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program seperti penataan kawasan, pembuatan fasilitas, pembentukan komoditi unggulan, namun program-program tersebut tidak sesuai dengan indikator-indikator dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga keberlanjutan ekonomi dalam konsep pembangunan agropolitan masih belum dapat terjamin secara optimal. *Ketiga*, keberlanjutan sosial budaya yang sasarannya adalah stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

Melihat perjalanan dari kebijakan agropolitan yang sudah berjalan hampir 10 tahun ternyata belum melahirkan komitmen politik yang kuat. Agropolitan seolah menjadi kepentingan kepala daerah, bukan menjadi sebuah kebijakan yang masyarakat butuhkan sehingga harus mendapatkan prioritas dan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah.

Di kota Batu, potensi SDA yang tinggi membuat masyarakat secara alamiah memanfaatkan SDA yang ada di desa yang dijadikan tempat tinggal, oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan agropolitan, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, kebijakan agropolitan belum berjalan secara optimal, sehingga angka kemiskinan dari tahun ketahun belum dapat dikaitkan dengan keberhasilan kebijakan agropolitan. Sedangkan jika dilihat secara garis besar *out put* yang ada pada keseimbangan sosial budaya dari pelaksanaan agropolitan masih sangat minim, dikarenakan banyak hal-hal yang masih belum terakomodir dan terjamin secara baik dalam kebijakan agropolitan ukuran-ukuran adanya keberlanjutan sosial budaya.

Daftar Rujukan

- Aziz, Iwan J dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT. Gramedia
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2011. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur tahun 2011*. Surabaya: Bappeda Jatim
- Budimanta, Arif. 2005. *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta : ICSD.
- Djajadiningrat, S.T. 2005. *Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Indonesia* Jakarta : Center for Sustainable Development.
- Djakapermana, Ruchyat Deni. 2003. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*. Diakses pada tanggal 30 Juni 2012
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota: Persepektif Kemiskinan Lingkungan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)
- Hikmat, Harry. 2000. *Makalah: Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)*. Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2007. *Makalah: Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Disampaikan Pada

Acara Wisuda Ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga
Administrasi Negara. Jakarta, 3 November 2007

Oetama, Jakob. 1990. *Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap
Tantangan Abad XXI*. Jakarta: Gramedia

Rondinelli, A. Dennis. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis–The Spatial
Dimensions of Development Policy*. London: Westview Press/Boulder

Soemarwoto, Otto, 2006. *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan
Realitas*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran
Bandung.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB
Press.

Tjokroawinoto, M. 1996. *Birokrasi dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar.